KOMUNIKASI POLITIK PEREMPUAN
(Strategi Komunikasi Politik Perempuan Fatayat Situbondo Dalam Hegemoni Politik Priyayi)

oleh:
Nur Ainiyah
Fakultas Dakwah IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo
nura_ifan@yahoo.com

Abstract:
This research has been aim for showing about how discourse analysis in media pilkada politic communication in situbondo, politic communication strategic was built by candidate of regency fatayat inhegemoni or power of priyayi politic in Situbondo. So became development in politic communication of candidate leader of area on practice and scholarship. Then many questions will be answered are: 1) how is Fatayat of women Situbondo preception of realty politic in Situbondo. 2) How do Fatayat women face the obstacles of political communication in Situbondo? 3) How do Fatayat women build political communication strategies in dealing with kyai political hegemony in Situbondo? By using qualitative-explorative research approach, some steps in observation data collection procedure, interview and documentation are done consistently and continuously so that the first research produce political climate in Situbondo is in the power of kyai (men) in gender analysis is patriarchy political culture so space women's politics are not as free as the political space of men. Both communication barriers and women's political participation are found in several factors, including cultural barriers, political capital constraints and human resource constraints. The three strategies of women's political communication are carried out in several ways: firstly lobbying, establishing cooperation with various parties and agencies, both communication processes ranging from message selection, media selection and proper selection of communication so that communication strategy becomes effective.

Key Words: komunikasi politik, strategi, gender, patriarki

A. Pendahuluan

Sudah tiga periode sejak tahun 2004 Indonesia sudah menyelenggarakaan PEMILU (pemilihan umum) secara langsung. Pemilihan umum secara langsung memberikan pendidikan politik tersendiri bagi masyarakat termasuk perempuan. Proses demokratisasi

dalam kehidupan bernegara lambat laun dipahami oleh masyarakat termasuk perempuan dalam tataran teknis. Keterlibatan perempuan dalam menentukan pilihan politik dalam pemilu memberikan kontribusi yang luar biasa dalam proses demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Segmentasi keterlibatan perempuan dalam bidang politik terdiri dari beberapa hal yakni pertama, perempuan sebagai subjek pemilih yang menentukan perolehan suara dalam pemilu; kedua perempuan sebagai pelaku strategis dalam bidang politik dan ketiga perempuan sebagai anggota atau calon legislative dalam pemilu. Ketiga segmentasi ini setidaknya membawa perempuan pada ranah politik.

Dari ketiga segmentasi ini, perempuan sebagai subjek pemilihlah yang paling banyak dibandingkan dengan dua hal lainnya. Hal ini tidak lepas dari anggapan bahwa pemilih perempuan sangat "mudah" untuk dipengaruhi dengan beberapa alasan yakni perempuan memiliki pemahaman tentang politik berbeda dengan laki-laki, perempuan dianggap lebih jujur dan "takut' dosa untuk tidak memilih terlebih jika pemilih perempuan sudah menerima sesuatu dari calon. Para calon paham betul akan situasi batin dari pemilih perempuan.

Saat ini pemahaman perempuan tentang dunia politik bisa dikatakan cukup baik, pemilihan umum secara langsung cukup memberikan kontribusi dalam tranformasi pendidikan politik bagi masyarakat dan perempuan. Perbincangan yang jarang dijadikan tema oleh para perempuan dan ibu-ibu pada *grass root*. Tiba tiba menjadi perbincangan yang menarik ketika menjelang PILKADA. Perempuan menjadi proaktif untuk mengakses informasi tentang siapa calon Bupati, calon Gubernur bahkan calon Presiden. Demikian halnya dalam pemilu legislatif, pemahaman perempuan tentang calon anggota DPR atau DPRD menjadi lebih terbuka ketika kelompok-kelompok perempuan didatangi oleh calon anggota legislative dalam forum perkenalan, silaturohmi dan kampanye yang dilakukan oleh para calon anggota DPR atau DPRD.

Fatayat Situbondo merupakan organisasi perempuan Nahdatul Ulama, yang menjadi wadah bagi perempuan situbondo dalam berorganisasi, mengasah pengetahuan, skill dan keterampilan. Sebagai ormas yang besar Fatayat selalu dilirik oleh berbagai kelompok kepentingan untuk bisa bekerjasama dalam politik terutama menjelang pemilu legislatif maupun Pilkada. Meskipun Fatayat bukan merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang politik akan tetapi dalam iklim perpolitikan Situbondo cukup diperhitungkan kontribusinya.

Organisasi ini cukup masif secara keorganisasian mulai dari tingkat

cabang situbondo, 17 anak cabang Kecamatan dan kurang lebih 170 ranting Desa. Kepemimpinan yang berjalam bisa dikatakan cukup professional, di mana semua pimpinan anak cabang dan ranting cukup aktif berkomunikasi dan berkegiatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat.

Kondisi baik ini sebenarnya bukan tanpa persoalan dan hambatan, peran perempuan dalam dunia politik menghadapi banyak hal yang menjadi hambatan, baik itu hambatan Kultural maupun hambatan pengetahuan, Secara kultural, perempuan distereotypekan sebagai orang yang: pemalu, takut, suka menangis. Sedang laki-laki diidentikan dengan: berani, pantang menyerah, tidak pernah menangis. Inilah yang menyebabkan perempuan mempunyai kendala dalam melakukan komunikasi politik karena perempuan sering minder, tak punya keberanian dan rendah diri ketika mendapatkan kritikan. Termasuk kehidupan sosial budaya Situbondo yang cukup patriarkis sebenarnya masih belum memberikan peluang pada perempuan terutama pada posisi-posisi strategis di dunia politik. Anggapan bahwa dunia politik adalah dunia publik dan hanya pantas dikuasai dan dimiliki oleh laki-laki masih begitu kental. Kultur situbondo yang religius dan memiliki banyak pondok pesantren semakin mengkukuhkan suasana patriarki di Situbondo.

``Realitas ini tentu menjadi hambatan dalam komunikasi politik perempuan termasuk perempuan anggota FATAYAT, sehingga perempuan anggota fatayat harus menciptakan strategi komunikasi tersendiri yang cukup persuasif agar bisa sampai pada tujuan bersama. Selain secara kultural, perempuan juga mempunyai banyak hambatan pengetahuan. Pendidikan perempuan yang kurang memadai disebabkan oleh banyak hal .Banyak perempuan yang tidak punya waktu dan kesempatan dalam belajar, berorganisasi, berkegiatan atau menbaca buku karena ia bertanggungjawab secara domestik. Perempuan yang bekerja di luar juga tak banyak mempunyai akses untuk berkomunikasi/ berjaringan/ mencari pengetahuan karena ia juga harus mengurusi urusan domestik. Belum lagi Indentifikasi tentang politik yang kotor dan korup juga menyebabkan perempuan menjadi takut untuk berkiprah di dunia politik. Dalam berkomunikasi secara politik, di satu sisi ini merupakan hambatan bagi perempuan untuk maju dalam berpolitik.

Lemahnya pengetahuan dan mental perempuan ini tentu semakin menyulitkan kaum perempuan dalam mengakases informasi dan menyampaikan informasi di depan publik. Perasaaan minder dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup maka perempuan tak berani berbicara di depan media. Tentu saja ini menjadi kesempatan laki-laki yang mengisi

media untuk berkomunikasi secara politik.

Pada PEMILU 2014 misalnya betapa kemudian beberapa partai politik sangat kesulitan ketika harus memenuhi kuato 30% caleg (calon legislative) perempuan. Sehingga beberapa partai politik cenderung "ngawur" dalam menyeleksi caleg perempuan.Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya beberapa partai gagal dalam kaderisasi perempuan. Pemahaman keadilan gender tidak begitu menyentuh wilayah politik. Meskipun pada pemilu legislative 2009 DPRD Situbondo dipimpin oleh Ketua Perempuan akan tetapi belum bisa memberikan perubahan yang signifikan dalam komunikasi politik perempuan di Situbondo. Ketidakmampuan perempuan dalam komunikasi politik ini akhirnya hanya menjadikan Keterlibatan perempuan sebagai pemilih dan belum pada posisi strategis akan tetapi seolah sebagai pelengkap saja.

Keberadaan Fatayat di Situbondo diharapkan bisa membawa perubahan dalam dunia politik perempuan. dengan menciptakan strategi-strategi komunikasi persuasive-strategis menghadapi tantangan kekuasaan politik Kyai yang menguasai kehidupan sosial politik di Situbondo. Atas realitas persoalan inilah kami tim peneliti mencoba mengungkap persoalan, kendala, hambatan dan tantangan yang dihadapi perempuan fatayat serta bagaimana perempuan fatayat membangun strategi komunikasi politik dengan persepktif gender di Situbondo, sehingga realitas iklim politik dalam kekuasaan kyai bisa mendukung dan menerima keterlibatan perempuan dalam situasi politik di situbondo. Dari latar belakang diatas riset ini hendak membahas tentang bagaimana pandangan perempuan Fatayat Cabang Situbondo melihat realitas politik di Situbondo. Juga akan dibahas tentang bagaimana perempuan Fatayat menghadapi hambatan-hambatan komunikasi politik di Situbondo. Selain itu dibahas juga perihal bagaimana perempuan Fatayat membangun strategi komunikasi politik dalam menghadapi hegemoni politik kyai di Situbondo.

B. Metodologi Penelitian

Dalam hal ini, subyek penelitian merupakan perempuan anggota Fatayat Cabang Situbondo meliputi pengurus harian Fatayat cabang situbondo dan beberapa anggota yang cukup aktif dalam keorganisasian Fatayat, dan anggota parlemen Situbondo yang mengetahui masalah penelitian dan bisa memberikan informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan focus penelitian komunikasi politik perempuan dan gender di Situbondo.

Aspek komunikasi yang menjadi obyek dalam peneltian ini adalah

symbol-simbol dan bentuk-bentuk komunikasi verbal dan nonverbal dalam komunikasi politik perempuan. Kegiatan komunikasi persuasive (interpersoanal) oleh perempuan dalam memciptakan jaringan politik, pengumpulan informasi politik dan mobilisasi politik dalam menghadapi situasi politik Situbondo.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka akan menggunakan metodologi dan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan beberapa cara diantaranya; teknik observasi, teknik wawancara mendalam dan pengumpulan data/dokumen tertulis.

Analisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Setelah peneliti mengumpulkan data sekunder dan primer, data social- politik dan komunikasi terkait dengan perempuan Fatayat. Maka peneliti akan melakukan pemilahan data dengan reduksi data dan display data. Menurut Miles dan Huberman dalam Moloeng (2007:308), pada dasarnya analisis data ini didasarkan pada pandangan paradigma positivisme. Analisis data itu dilakukan dengan mendasarkan diri pada penelitian lapangan apakah : satu atau lebih dari satu situs. Jadi sewaktu hendak melakukan analisis data harus menelaah terlebih dahulu apakah pengumpulan data yang telah dilakukannya satu atau dua situs yakni reduksi dan display.

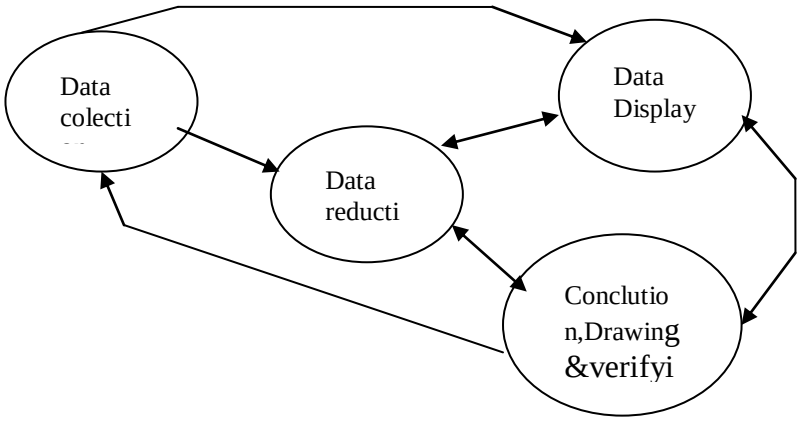

Gambar 2.
Skema analisa data

Reduksi data penting dilakukan untuk memilah dan mengelompokkan data sesuai dengan domain analisisnya. Dengan begitu peneliti akan melakukan langkah analisa data kualitatif. Dengan begitu

peneliti bisa menemukan dan merumuskan formulasi strategi komunikasi politik perempuan Fatayat Situbondo. langkah ini merupakan langkah awal dalam metode analisis induktif untuk mendapatkan kebenaran hasil penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perempuan, politik dan Fatayat Situbondo

Fatayat Situbondo merupakan organisasi perempuan Nahdatul Ulama, yang menjadi wadah bagi perempuan situbondo dalam berorganisasi, mengasah pengetahuan, skill dan keterampilan. Sebagai ormas yang besar Fatayat selalu dilirik oleh berbagai kelompok kepentingan untuk bisa bekerjasama dalam politik terutama menjelang pemilu legislatif maupun Pilkada. Meskipun Fatayat bukan merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang politik akan tetapi dalam iklim perpolitikan Situbondo cukup diperhitungkan kontribusinya.

Dalam aras politik, tampaknya Fatayat menjadi satu-satunya organisasi perempuan yang terlibat dalam advokasi peraturan/undang-undang pemilu sejak 2003 (Fithriati; 2008). Kini perempuan-perempuan NU sudah mulai duduk di badan legislatif. Sebagian juga sudah masuk dalam pemerintahan. Tentu, keterlibatan NU dalam politik praktis melaluiberbagai partai yang ada di dindonesia salah satunya Partai Kebangkitan Bangsa dan PPP semakin membuat peluang untuk mencetak para pemimpin perempuan NU lebih banyak lagi. *Kedua*, sebagai gerakan pemberdayaan perempuan, Fatayat NU sudah harus mulai melebarkan sayapnya, tidak hanya berkutat pada pencerahan keagamaan—meskipun ini tetap penting—tetapi juga harus mulai menyentuh wilayah ekonomi dan kesehatan. Ingat bahwa mayoritas anggota Fatayat adalah ibu rumah tangga dan kemudian wiraswasta *(other self-employed activities)*. Kedua hal ini penting sebagai kebutuhan dasar manusia. Komunitas-komunitas pembedayaan perempuan di bidang ekonomi (baca: ekonomi riil seperti koperasi, kerajinan, pertanian, industri kecil, menengah, dan sebagainya) menjadi wajah untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut. *Entrepreneurial or vocational training* seringkali menjadi agende kesekian setelah program-program *literacy*, *capacity building*, dan konseling.

Ketiga, Fatayat NU juga harus mampu menjadi *leading sector* penyampai pendidikan politik bagi perempuan. Pendidikan politik di sini bermakna luas, bisa politik praktis, politik hukum, politik anggaran, Hak Asasi Manusia, dan pengetahuan tentang anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Memang politik bukanlah priotitas utama tujuan pendirian Fatayat, (sebagaimana hasil penelitian Nunung Nuryartono & Pataporn

Sukontamarn; 2010), namun dalam kehidupan sehari-hari kini kita tidak bisa terhindar dari imbas kebijakan politik. Oleh sebab itu, perempuan harus dibekali hal-hal tersebut. Sebab manuver-manuver dan permainan-permainan politik semakin canggih. Perempuan tentu diharapkan menjadi penjaga agar agenda politik tidak melenceng jauh, HAM terjaga, dan korupsi tidak merajalela. *Walhasil*, Fatayat NU harus lebur dalam persoalan dan tantangan masyarakat. Perjuangan para pendahulu harus diteruskan dan belum usai.

Jika dilihat dari fungsionaris partai politik, kepengurusan partai politik hampir semuanya di dominasi laki-laki hanya sebagian kecil perempuan yang menduduki jabatan di partai. Kecilnya jumlah perempuan yang duduk di partai politik dan badan legislatif menyebabkan kurang berpengaruhnya proses pengambilan keputusan dan produk kebijakan yang menyuarakan aspirasi perempuan.

Hak perempuan untuk berpartisipasi dalam politik adalah termasuk Hak Asasi Manusia, karena demokrasi tidak mungkin bisa dibangun tanpa keikutsertaan perempuan. Ini memperlihatkan pandangan partai politik mengenai peran politik perempuan serta gagasan kuota. Partai-partai politik tampaknya kurang memandang penting peran aktif perempuan dibidang politik. Bahkan muncul kesan, bagi partai-partai tersebut pemajuan kondisi perempuan di Indonesia akan datang dengan sendirinya bersamaan dengan terwujudnya demokrasi di negara ini dan pada penghormatan isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang secara otomatis akan berdampak pada peningkatan Hak Asasi Manusia perempuan.

Ada berbagai alasan yang sering di kemukakan berkaitan dengan sukarnya akses perempuan dalam peran-peran publik tersebut. *Alasan pertama,* kita masih dalam budaya patriarkhi mencirikan kepemimpinan laki-laki, tidak peka gender, dan kurang leluasa memberikan peranan kepada kaum perempuan untuk akses tersebut. Dalam masyarakat patriarkhi seperti Indonesia, peluang perempuan untuk meraih jabatan-jabatan itu membutuhkan pengorbanan tersendiri (kalau tidak bergantung pada nasib). Para politik kita yang kebanyakan kaum laki-laki, kecil kemungkinan mengakomodasi kepentingan perempuan. *Alasan kedua*, perempuan sendiri memang tidak berusaha mendapatkan kedudukan itu. Mereka cukup puas berada dibelakang layar, peran-peran publik dengan mendukung perjuangan laki-laki yang nota bene antara lain suami, kakak, kakek, atau saudara laki-laki mereka. Dalam konteks ini berlaku falsafah *trickle down effect*, yakni ketika laki-laki memperoleh kedudukan, keuntungan dan kesejahteraan tentu akan menetes dan ikut mensejahterakan perempuan.

Bagaimanapun pada hakikatnya, sebagaimana konsep nurture (perbedaan laki-laki dengan perempuan adalah sebagai hasil konstruksi sosial dan budaya) dan nature (kodrat/alam) yang untuk selanjutnya membedakan peran dan tugas yang berbeda. Karena perbedaan yang demikian, maka tidak mungkin kaum perempuan mampu menyetarakan dirinya dengan kaum laki-laki. Karena itu di cari suatu terobosan untuk mencapai adanya keadilan gender.

Kesetaraan gender, berarti perempuan dan laki-laki menikmati status dan memiliki kondisi yang sama untuk menggunakan hak-haknya dan kemampuannya secara penuh dalam memberikan konstribusinya kepada pembangunan politik, ekonomisosial, dan budaya. Dengan demikian kesetaraan gender merupakan penilaian yang sama yang diberikan masyarakat atas kesamaan dan perbedaan antara perempuan dan laki-laki, dan atas berbagai peran yang mereka lakukan.

Affirmative Action, dimana minimal harus terdapat 30 persen perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Undang-undang Nomor 2Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 merupakan media hukum yang revolusioner di bidang kepartaipolitikan di negeri ini.

Rendahnya representasi perempuan dalam politik formal merupakan masalah penting bagi perempuan untuk mengartikulasikan kepentingannya. Karena dengan keadaan seperti itu maka kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan menjadi kurang menunjukkan keberpihakkan terhadap kepentingan-kepentingan perempuan. Dengan memasukkan berbagai kepentingan perempuan diharapkan dalam pengambilan keputusan dapat lebih sensitif terhadap berbagai macam perbedaan tidak saja perbedaan kepentingan gender, tapi juga perbedaan-perbedaan kelas sosial, suku, agama, orientasi seksual, dan lain-lain. Agar suara perempuan memiliki kesempatan untuk membawa perubahan yang berarti dalam proses pengambilan keputusan politik.

Pada pemilihan umum legislatif tahun 2009 semua calon legislatif apakah dia seorang politisi senior atau junior, seorang calon legislatif laki-laki atau perempuan atau ditempatkan di nomor urut pilihan yang kecil atau yang besar, semuanya akan memiliki peluang setara untuk terpilih dan juga tidak terpilih pada pemilihan umum legislatif tahun 2009. Strategi yang harus dilakukan oleh masing-masing calon legislatif hanya satu yaitu, bagaimana memperoleh "suara terbanyak". Rumusnya sangat sederhana, yaitu popularitas ditambah elektabilitas menghasilkan jumlah suara terbanyak dan suara untuk satu kursi. Di dalam situasi politik seperti ini, cara berpolitik dengan menerapkan nasehat politik Machiavelli

akan dengan mudah dijumpai di berbagai tempat. Mekanisme ini menunjukkan adanya dan akan terjadi persaingan bebas antar-politisi, internal dan eksternal partai, lelaki vs perempuan.

Dengan kata lain, ada pembelajaran politik bagi semangat demokrasi yang baik dan adil bagi kehidupan demokrasi bangsa. Dengan demikian, partai politik mau tidak mau harus merevitalisasi peran dan kinerjanya dalam membangun institusi partai menjadi lebih modern dan menghasilkan calon legislatif yang berkualitas, dikenal dan mampu menjaring konstituennya masing-masing.

Rendahnya jumlah perempuan yang mendapatkan kursi menjadi fenomena politik yang terjadi di Kabupaten Situbondo. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Situbondo, perempuan yang ikut mencalonkan diri pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 kemarin mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup tinggi, hampir 80% calon legislatif perempuan tersebut lulusan Strata-1. Meraka merupakan perempuan yang cukup berkompeten untuk ikut dalam percaturan politik dan seharusnya mampu bersaing dengan calon legislatif laki-laki. Akan tetapi realita dilapangan berbeda dengan apa yang diinginkan oleh para calon legislatif perempuan karena dari hasil perhitungan suara calon legislatif laki-laki lebih banyak mendapatkan kursi dibandingkan calon legislatif perempuan.

Adapun nama-nama caleg yang telah ditetapkan sebagai legislator/anggota DPRD Situbondo periode 2014-2019 mendatang. Dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Fathor Rachman, Suyanto, Fiqi. K, Sukanto, Mahbub. J, Tolak Atin, Edy. W, Mohamad Nizam, Junaidi, Bashori. S, dan Ana.Y. Dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terpilih yakni Suwarnam, Zainiye, Abdul Rahman, Z. Arifin, Hasanah. T, H. Faisol, H. Mohdar, Joko. P, H. Fahrudi. Partai GOLKAR yakni Hj Aisyah, Heru. S, Zuhri, H. Ilham, Siswo, dan A. Busyari. Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) yakni Rudi. A, Totok, Djoko. S, Ningsih, Andi. H, Eko Budi. S, dan Narwiyoto. Partai Demokrat (PD) yakni Janur Sasra. A, Hadi. P, Sahlawi, Sunardi dan Sumardjono. Partai GERINDRA yakni Jainur Ridho, Samsi Ika. S, dan H. Supeno. Partai HANURA yakni Hery P, dan Mohamad Nizar. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hanya satu yakni Lailatil. Q. Dan dari Partai NASDEM yakni H. Musonif. F dan H. Fajri. YR.

Dari total anggota dewan perwakilan rakyat periode 2014-2019 sebanyak 47 orang, anggota legislative perempuan terdapat hanya delapan orang. Tentu saja jumlah ini belum mencapai 30 persen dari keselurhan anggota dewan.

2. Iklim Politik Patriarki (Priyayi) Kota santri Situbondo

Kekuasaan politik situbondo berada dalam kekuatan tokoh-tokoh agama dan tokoh kultur, para kyai, tokoh masyarakat dan pemimpin-peminmpin kelompok-kelompok social. Kekuasaan antara pondok pesantren barat (Walisongo) dan timur (salafiyah-safiiyah) member kontribusi luar biasa terhadap masa depan situbondo. dua pesantren besar ini merupakan keturunan dari KHR. As'ad syamsul Arifin yang baru baru ini mendapat gelar pahlawan nasional. Sehingga kekuasaan politik serta berbagai kebijkan dan pengambilan keputusan pemerintah daerah masih mendengarkan nasehat dari sesepuh politik situbondo.

Kultur kekuasaan patriarki dimana para kyai dan tokoh kultur ini sudah berlangsung sangat lama sehingga ada ungkapan salah satu kyai situbondo " jika masih ada laki-laki yang mampu untuk memimpin kenapa harus perempuan yang maju". Ungakapan ini menginterpretasikan tidak ada kesempatan dan kompetisi yang sama antar laki-laki dan perempuan dalam dunia politik. Laki-laki masih memiliki kesempatan pertama dan utama bila dibandingkan politisi perempuan.

Dominannya peran kyai dalam sistem sosial pada masyarakat Indonesia membuat posisi para kyai sangat penting sehingga masyarakat sering menjadikan kyai sebagai rujukan dalam masalah kehidupan sehari-hari seperti urusan ibadah, pekerjaan, urusan rumah tangga bahkan urusan politik. Di Indonesia yang kebanyakan menganut agama Islam kyai merupakan salah satu prioritas utama yang mempunyai kedudukan sangat terhormat dan berpengaruh besar pada perkembangan masyarakat tersebut. Kyai sebagai salah satu tokoh strategis dalam masyarakat karena ketokohannya sebagai figur yang mempunyai pengetahuan luas dan mendalam mengenai ajaran agama Islam. Kharisma yang dimiliki oleh para kyai menyebabkan mereka menduduki posisi kepemimpinan dalam lingkungannya. Selain sebagai pemimpin agama dan pemimpinmasyarakat desa (bahkan nasional), kiai juga memimpin pondok pesantren tempat ia tinggal, perkataan seorang kyai biasanya tidaklah dibantah, ia menjadi ikutan banyak orang, kerapkali tanpa mempersoalkan apakah dasar pendapat itu dan bagaimana nilainya.

Sebagai elit agama, kyai mempunyai kewajiban untuk menegakkan nilai-nilai agama dengan cara *amar ma'ruf nahi munkar.* Pada saat yang sama, kyai sebagai salah satu sumber ajaran agama yang pandangan dan pemikirannya menjadi referensi. Sebagai elit sosial, kyai menjadi panutan dan sekaligus pelindung masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Dalam kaitan kyai sebagai figur yang paling terpandang di kalangan masyarakat yang menjadikan setiap perilaku dan ucapannya

diikuti oleh masyarakat.

Beberapa dimensi keterlibatan kyai dalam politik dalam konteks sosial maupun ekonomi yang diperkirakan berpengaruh hingga mengakibatkan lahirnya variasi respon kyai dalam politik itu sendiri, ada yang dengan tegas menyatakan tidak mau terlibat dengan politik, ada pula yang terang-terangan mendukung salah satu partai politik dengan berbagai macam alasan. Karena partisipasi lebih memberikan nuansa aktif dan dilakukan dengan kesengajaan.

Politik dalam arti luas adalah suatu kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat, oleh karena itu ilmu politik dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari hakikat, kedudukan dan penggunaan kekuasaan dimanapun kekuasaan itu ditentukan. Sedangkan arti kekuasaan sendiri adalah kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berfikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa politik merupakan kemampuan dalam mengorganisir ataupun mengatur pola interaksi sosial dalam masyarakat, termasuk mengatur hajat hidup masyarakat secara keseluruhan. Itulah mengapa salah satu cara yang paling ampuh dalam mengelola masyarakat ialah melalui politik dan manakala manusia yang dipercaya dalam mengatur kebijakan bermasyarakat dipilih melalui mekanisme politik, baik secara *voting* maupun secara musyawarah untuk *mufakat.*Ada beberapa konsep yang berkaitan dengan kekuasaan yaitu : *Influence* atau pengaruh, yaitu bagimana seseorang mampu pengaruhi agar orang lain berubah secara sukarela. Manipulasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain namun yang dipengaurhi tidak menyadari.*Coersion* adalah ancaman atau paksaan agar orang lain sesuai dengan kehendak yang punya kekuasaan.*Force* yaitu tekanan fisik, seperti membatasi kebebasan. Ini biasanya dilengkapi dengan senjata, sehingga orang lain mengalami ketakutan.

Dapat juga dikembangkan dalam bentuk teori *Hegemoni* yang artinya adalah kekuasaan dan dominasi yang dipegang oleh satu kelompok sosial terhadap kelompok lainnya atau kyai dan masyarakat atau santrinya. Kecenderungan menarik dukungan kyai dan tokoh-tokoh pesantren tersebut memperlihatkan bahkan nilai politik kyai dihadapan para politisi dalam upaya mereka membangun basis dukungan ataupun sekedar legitimasi bagi kepentingan.

3. Hambatan Komunikasi Politik Perempuan Fatayat

Dalam penelitian ini ada beberapa factor hambatan komunikasi politk perempuan Fatayat di situbondo. termasuk hal hal apa saja yang mempengaruhi serta bentuk-bentuk strategi komunikasi politik perempuan dalam komunikasi politik di kepengurusan Fatayat NU Situbondo tahun 2016. Dari penelitian tersebut akan diketahui faktor-faktor apa saja yang mendasari dan menghambat kegiatan politik serta bagaimana dan seperti apa bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh perempuan yang menjadi pengurus di Fatayat Situbondo tahun 2016.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dari beberapa sumber yang telah penulis temui, ada berbagai macam faktor yang dapat memotivasi mapun menjadi kendala bagi perempuan untuk ikut berstrategi komunikasi politik dalam politik, khususnya sebagai pengurus Fatayat Situbondo. Motivasi dan kendala yang muncul berasal baik dari internal perempuan maupun lingkungan eksternal. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menjelaskan hal-hal yang terkait didalamnya, seperti apa saja yang menjadi motivasi dan kendala internal perempuan maupun motivasi dan kendala dari lingkungan eksternal yang mempengaruhi strategi komunikasi politik perempuan dalam komunikasi politik di Fatayat Situbondo tahun 2016.

Selain itu bagaimana perempuan dapat berperan dalam komunikasi politik, khususnya di lingkungan Fatayat Situbondo. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menjelaskan hal-hal yang terkait didalamnya. Apa saja bentuk komunikasi politik yang dilakukan, media atau saluran apa yang digunakan, jenis pesan dan khalayak seperti apa yang menjadi audience mereka hingga efek komunikasi politik yang mereka harapkan sebagi hasil dari strategi komunikasi politik politik mereka di Fatayat Situbondo tahun 2016.

Melihat data rendahnya partisipasi perempuan dalam politik, menyiratkan adanya kendala bagi perempuan untuk terjun ke dunia politik. Kendala-kendala ini dapat dikelompokkan menjadi empat yakni hambatan ideology dan psikologi, hambatan sebagai sumber daya manusia, hambatan kelembagaan dan struktural serta hambatan dana[1.] Hambatan pertama adalah budaya dan psikologi. Nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat sangat *sterotipe* dan patriarkal sehingga berbagai tafsiran atas teks agama juga bias gender. Laki-laki sebagai figurr yang layak menjadi pemimpin dan pengambil keputusan.

Hambatan berikutnya adalah hambatan sumber daya manusia. Sejak dini perempuan sudah dibesarkan dan dikondisikan untuk merasa "tidak nyaman" di dunia politik karena politik dianggap bukan dunianya.

Hal ini menyebabkabkan perempuan tidak percaya diri dan "tidak acuh" terhadap dunia politik sehingga tidak mampu mengaktualisasikan tanggung jawab publiknya sebagai warga negara. Sebagai akibat perlakuan yang berbeda, umumnya perempuan berpendidikan lebih rendah dari laki-laki dan kurang akses informasi. Dampak lebih jauh ialah tertinggalnya perempuan di segala bidang kehidupan.

Selain itu, hambatan lain berasal dari kelembagaan dan struktural. Sistem politik Indonesia bersifat maskulin dan belum responsif gender. Affirmatif 30 persen dalam UU Pemilu yang masih tampak "setengah hati", merupakan rintangan berat bagi perempuan untuk memasuki dunia politik. Sistem penyelenggaraan negara belum begitu tanggap gender serta sistem internal partai politik tidak demokratis dan tidak peka gender. Hal ini merupakan tantangan berat bagi perempuan untuk menerobos dan merubahnya.

Hambatan yang tidak kalah besar adalah hambatan dana. Terlibat dalam dunia politik berarti melibatkan dana yang cukup besar, apalagi dunia politik rawan "politik uang". Segala hambatan budaya, psikologi dan sumber daya harus ditambah lagi dengan masalah dana sehingga jika memiliki dana yang mencukupi, maka akan mendukung perempuan berkecimpung di dunia politik. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa secara teori dan kenyataan, perempuan yang ingin ambil bagian dalam dunia politik memerlukan motivasi dan strategi politik yang jitu agar dapat mencapai tujuan yang dicanangkan.

4. Beberapa faktor penghambat partisipasi Politik perempuan fatayat

Perempuan sebagai mayoritas penduduk di Indonesia memiliki berbagai keterbatasan untuk dapat lebih aktif dalam ranah publik, khususnya dunia politik dan pembuat kebijakan. Beberapa aspek terkait seperti kondisi lingkungan dan kondisi pribadi perempuan itu sendiri masih membatasi komunikasi atau keikutsertaan perempuan dalam wilayah publik, khususnya politik. Berbagai kendala baik sosial maupun psikologis menjadi hambatan akan komunikasi nya dalam berpolitik.

Berbagai kendala yang muncul dari internal perempuan sendiri cukup banyak. Diantaranya adalah berbagai masalah berikut yang diakui perempuan di kepengurusan Fatayat Situbondo sebagai penghambat komunikasi perempuan dalam politik yaitu:

Pertama, Beban Ganda Perempuan. Beban ganda perempuan sebagai seseorang yang 'diharuskan' bertanggung jawab penuh dalam lingkungan domestik (rumah dan keluarga) sekaligus berkativitas di

wilayah publik mengharuskan perempuan untuk mengorbankan waktu lebih banyak atau harus pandai dalam *management* waktu. Hal ini harus dilakukan agar wilayah domestik sebagai 'tanggung jawab utama' tetap terkontrol sembari tetap berperan aktif di wilayah publik, khususnya politik.

"Tapi memang tidak semua perempuan itu siap terjun ke politik. Saya pikir kendalanya sama, Perempuan yang siap terjun di dunia politik itu tidak banyak. Kendalanya kembali ke rumah. Tentang fungsi gandanya. Semua orang mempunyai kapasitas atau juga kekuatan fisik. Karena dia harus bisa berperan lebih. Jadi tidak semua perempuan siap untuk berperan ganda itu[1]"

Kedua, Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Ekonomi Perempuan. Kendala ekonomi dan pendidikan yang juga menjadi tantangan besar bagi usaha peningkatan komunikasi perempuan di wilayah publik. Kendala ekonomi menyulitkan perempuan untuk dapat secara total terjun dalam kancah politik. Ketergantungan ekonomi terhadap orang lain menjadikan perempuan tidak bisa mengambil keputusan utnuk melakukan keputusan dalam *budgeting* politik. Zeiniye mengatakan:

"ongkos politik yang saya keluarkan cukup mahal, dalam pemilu 2014 saja misalnya dana yang saya keluarkan cukup banyak sebagi konsengwensi dari pencalonan saya, jujur saja masyarakat konstituen tdak cukup dengan program yang saya berikan tapi harus ada uang pengganti waktu kerja mereka. Hal ini saya lakukan agar mereka tidak golput" papar Zeiniye[2].

Hilangnya kesempatan memperoleh pendidikan dan keterbatasan ekonomi melahirkan kekerasan baik fisik maupun mental serta hambatan yang menghalangi bagi kaum perempuan untuk tumbuh dan berkembang. Secara kultural *image* perempuan yang terbangun adalah sebagai ibu rumah tangga yang bergelut dengan lingkungan domestik.

Kedua hal ini, baik pendidikan dan ekonomi, disadari betul oleh para pengurus Fatayat Situbondo, minimnya Sumber Daya Manusia yang menjadi kendala dalam organisasi khususnya Fatayat sendiri secara tidak langsung juga akibat dari minimnya pendidikan dan kemapanan ekonomi perempuan. Kedua isu ini yang sejauh ini gencar disuarakan oleh mereka. Bagaimana perempuan bisa memperoleh minimal pendidikan dasar dan juga memberikan pengajaran *skill* atau ketrampilan usaha sehingga para perempuan akan lebih mandiri secara ekonomi.

---

[1] Zainiye. Wawancara tanggal 03 September 2016.
[2] Zainiye. Wawancara tanggal 03 September 2016.

Ketiga, Kesalahan Pemahaman Politik Masyarakat. Pandangan masyarakat tentang politik yang salah, menjadikan masyarakat sudah memandang sebelah mata terhadap peran perempuan dalam politik. Hal ini juga ditemukan dalam penelitian ini, bahwa beberapa pengurus Fatayat Situbondo cukup terganggu dengan pandangan negatif masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam politik. Pandangan masyarakat bahwa politik itu kotor menjadi sesuatu yang mengancam bagi perempuan, mengkerdilkan keberanian perempuan untuk tampil berpolitik. Pehaman yang salah bahwa politik hanya untuk orang-orang yang menginginkan kekuasaan dan memiliki kemampuan finansial yang luarbiasa juga memagari idealisme perempuan yang pada umumnya masih bergantung terhadap laki-laki.

"Paling berat adalah meluruskan persepsi bahwa politik itu kotor. Misalnya kemarin saya ada di daftar calon legislatif, disitulah yang berat, bagaimana meluruskan berpolitik itu kotor sehingga seringkali kalau menjadi caleg harus mempunyai uang banyak, ingin menduduki jabatan tertentu di dewan, menginginkan materi. Itu yang membuat kita kadang merasa berat untuk melangkah karena dibayang-bayangi omongan orang,[3]"

Keempat. Hambatan Kultural. Hambatan kultural lain, perempuan juga distereotypekan sebagai ibu rumah tangga, pekerja domestik, tak pantas tampil di publik dibandingkan laki-laki. Persepsi streotip ini menyebabkan perempuan mendapatkan dan menghadapi banyak kritik ketika tampil di muka public, antara "pantas dan tidak pantas". Mereka juga distereotypekan sebagai orang yang: tak pantas memimpin. Identitas inilah yang menyebabkan perempuan menjadi enggan untuk berbicara terbuka, malu, tidak percaya diri. Bahkan di Amerika ada *stereotype* tentang *Cinderella complexe* untuk perempuan. Yaitu perempuan identik dengan orang yang malu, tak percaya diri kemudian dipinang menjadi seorang putri karena menikah dengan bangsawan kaya.

Asumsi tentang perempuan tersebut tidak terkecuali bagi perempuan Situbondo. perempuan Situbondo menghadapi persoalan yang lebih komplek terkait dengan persepsi budaya, agama, social dan politik. Pengaruh kekuasaan politik kyai di Situbondo tentu saja membatasi keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Peralihan kekuasaan mulai dari tingkat kepala desa sampai pada Bupati tidak lepas dari kekuasaan politik kyai atau para Kyai. Maka perempuan harus memiliki strategi komunikasi politik tersendiri agar keterlibatan perempuan di dunia

[3] Zainiye. Wawancara tanggal 03 September 2016.

politik bisa dipertimbangkan bukan hanya sebagai pemilih tetapi juga sebagai pelaku strategis dalam iklim politik Situbondo.

5. Strategi Komunikasi Politik Perempuan Fatayat

Partisipasi politik perempuan memang dianggap sangat kurang, baik dalam perwakilan parlemen sebagai pembuat kebijakan atau pada tataran pengurus partai. komunikasi politik perempuan dalam politik merupakan salah satu wacana penting yang ingin segera direalisasikan. Membangun komunikasi perempuan dalam politik, yaitu:

a. Mengoptimalkan peran wanita dalam segala bidang kehidupan dengan tetap memelihara harkat dan martabat kewanitaanya.
b. Membangun kondisi yang kondusif bagi optimalisasi peran politik wanita dalam mengusung cita-cita politik dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam dan fitrah.
c. Keseimbangan hak pemberdayaan politik.
d. Keseimbangan proporsional dalam penempatan wanita di lembaga-lembaga strategis baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
e. Perhatian yang cukup terhadap isu-isu kontemporer wanita yang berkembang di masyarakat.

Itikad baik tersebut diwujudkan dengan menggiatkan berbagai kegiatan pendidikan politik bagi kader perempuan dan memunculkan organisasi dan kegiatan yang diharapkan dapat merangsang dan mengoptimalkan komunikasi perempuan dalam politik. Beberapa usaha tersebut diantaranya membentuk Forum Wanita Keadilan yang merupakan forum bagi para anggota dewan atau angota legislatif perempuan untuk dapat melakukan *sharing* dan pendidikan politik terhadap kader perempuan Fatayat.

Bentuk komunikasi Politik perempuan Fatayat Situbondo dari hasil penelitian di lapangan tampaknya cukup baik, hal ini dapat dilihat dari berbagai aktivitas politik yang mereka ikuti. Beberapa aktivitas politik yang dijalankan oleh perempuan Fatayat Situbondo antara lain sebagai berikut.

a. Bergabung dalam Partai Politik dan Organisasi Kepentingan.

Menjadi anggota suatu partai atau organisasi kepentingan, bahkan menjadi pengurus didalamnya merupakan beberapa bentuk komunikasi politik perempuan yang banyak dilakukan.

Demikian halnya dengan beberapa perempuan yang menjadi pengurus Fatayat Situbondo, mereka rata-rata sudah menjadi pengurus partai selama beberapa tahun untuk kemudian aktif mengurus organisasi

Fatayat Situbondo. Seperti halnya diungkapkan oleh Zeiniye ketua fatayat situbondo dan termasuk salah satu anggota DPR dari F-PPP:

" tidak mudah bagi perempuan untuk terjun ke dunia politik tetapi saya dengan niat untuk membangun situbondo dan memberdayakan masyarakat berusaha bagaimana mendapat dukungan dari masyarakat konstituen saya. Dan kebetulan pada pemilu 2014 lalu perolehan suara saya tertinggi untuk DAPIL 2. Hal ini bukan say adapt dengan mudah tapi penuh perjuangan dengan program pemerbadaay ekonomi, pedidikan dan social saya masuk untuk menarik aspirasi masyarakat, kebetulan saya ketua Fatayat NU di situbondo jadi hal ini memudahkan saya untuk melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak"

*D*alam *Organizational activity* yang meliputi keterlibatan warga masyarakat ke dalam berbagai organisasi sosial dan politik, apakah itu sebagai pimpinan, aktivis, ataukah sebagai anggota biasa juga merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan perempuan Fatayat Situbondo. Fatayat secara organisatoris mempunyai fungsi mempengaruhi pemerintah dalam pembuatan kebijaksanaan publik. Menjadi anggota saja sudah menunjukkan elemen komunikasi sekalipun seseorang belum tentu terlibat secara langsung mempengaruhi pemerintah.

b. Mengikuti Rapat Umum Partai

Perempuan dalam kepengurusan Fatayat Situbondo cukup memanfaatkan rapat umum maupun rapat struktural dalam hal ini adalah PPP (partai Persatuan Pembangunan) sebagai wujud komunikasi politik mereka. Perempuan dalam kepengurusan Fatayat Situbondo turut ber komunikasi mengikuti rapat umum atau rapat struktural antar anggota maupun pengurus partai baik ditingkat daerah maupun nasional. Dalam komunikasi politik semacam ini perempuan cukup mendapatkan kesempatan untuk memperjuangkan keberadaan mereka dan menyuarakan kepentingan kaumnya. Setidaknya ada lebih dari lima orang perempuan pengurus fatayat ditingkat cabang situbondo yang juga menjadi pengurus DPC PPP situbondo.

"*Kalau dalam tataran kita mungkin lewat dewan yang ada di legislatif. Kalau di tingkat partai sendiri kita sudah mencoba, katakanlah dalam rapat, misalnya mengevaluasi hasil pemilu, kita bisa memberi masukan-masukan. Koordinasi PW-PPP nanti dievaluasi dan mencoba membentuk kesepakatan yang nantinya akan disampaikan kepada pengurus DPP pusat. Salah satunya adalah lebih memberdayakan wanita, dan usul-usul serta peran wanita agar lebih diakui. Biasanya kita melalui simposium. Kalau DPP kita mengumpulkan seluruh Indonesia kalau tingkat*

wilayah dan daerah lebih banyak ke pengurus-pengurus kewanitaan kita evaluasi dari setiap lini jika memang itu dibutuhkan," tutur Hasanah Thahir.

Mengikuti kegiatan rapat partai merupakan sebuah kegiatan komunikasi politik yang dilakukan oleh para perempuan di kepengurusan Fatayat Situbondo. selain itu, kegiatan rapat juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab dan kepatuhan terhadap peraturan keanggotaan partai politik

c. Komunikasi dalam Pemilihan Umum (pemilu)

Kegiatan yang berkaitan dengan pemilu *(Electoral activity)* merupakan bagian dari program yang dilakukan para perempuan Fatayat Penelitian menunjukkan ada beberapa kegiatan yang dilakukanoleh perempuan pengurus Fatayat Situbondo sebagai komunikasi nyadalam pemilu antara lain seperti melakukan sosialisasi pemilu, sosialisasi calon legislative dan pencontrengan, menyiapkn kader atau calon legislatif perempuan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Silina

"Kita biasanya memberikan pencerahan-pencerahan, misalnya sebelum pemilu kita jelaskan cara-cara pencontrengan, kemudian kita jelaskan siapa calegnya, kita jelaskan semua yang berkaitan dengan pemilu. Misalnya kita akan memilih apa, misalnya anggota legislatif, kita jelaskan apa tugas-tugas mereka. Kemudian pemilihan presiden juga kita jelaskan. Kemudian kita berikan motivasi-motivasi kepada para perempuan untuk mereka lebih mandiri dalam berpolitik. Silina juga mengatakan *"Kayakna perempuan sekarang sudah cerdas. Seperti kemarin soal contreng-mencontreng itu bisa. Sebelumnya kan sudah ada sosialisasi. Sebenarnya ini kan tugas KPU untuk memberikan penerangan kepada masyarakat. Tapi nggak tau kenapa mungkin lembaga-lembaga itu itu kalau dana belum turun belum gerak. Makanya kita dari partai itu gemes, makanya kadang kita ambil 'jalan pintas'. Ada aleg, kita panggil ke suatu pertemuan pengajian itu biasanya, tapi bukan inti dari pengajian,"*

d. Mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau parlemen

Komunikasi dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dalam rangka membangun hubungan sektoral terkait program-program fatayat juga dilakukan dalam langkah komunikasi dan partisipasi politik perempuan kedepan.

Lobbying merupakan segala tindakan seseorang ataupun sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh

politik dengan tujuan mempengaruhi pejabat atau pun tokoh politik tersebut yang menyangkut masalah tertentu tentang yang mempengaruhi kehidupan mereka. Para pengurus Fatayat Situbondo juga memiliki hubungan personal yang cukup baik dengan para anggota legislatif, khususnya dengan anggota legislatif yang berasal dari perempuan. Kedekatan ini juga sedikit banyak dimanfaatkan oleh para pengurus Fatayat Situbondo untuk memasukkan usulan, keluhan, dan berbagai masukan agar dapat sampai ke dewan sehingga berbagai masalah yang datang ke mereka diharapkan dapat lebih terbantu. Seperti yang diungkapkan oleh Hamida:

"Untuk mempengaruhi kebijakan, kita selalu berupaya ketika itu menyangkut isu-isu yang menyangkut perempuan dan anak, karena itu memang garapan kita. Dari situ kita sampaikan ke dewan atau terus kemudian ke eksekutif belum,"

Adanya produk undang-undang yang menjamin komunikasi perempuan dalam politik diharapkan dapat dimanfaatkansecara benar. Dalam hal ini kemudian bukan hanya memaksakan keterwakilan perempuan secara kuantitas saja tanpa mempertimbangkan kapabilitas dan kualitas perempuan. Pentingnya peran serta perempuan dalam tingkatan pembuat kebijakan disadari betul oleh para kader FATAYAT yang juga menjadi pengurus Fatayat Situbondo. Dalam hal ini mereka lebih melihat sebagai penyeimbang dan juga memenuhi kebutuhan bagi kurangnya komunikasi perempuan dalam politik di Indonesia yang memiliki penduduk perempuan lebih dari separuh. Seperti yang diungkapkan oleh Zeiniye sebagai ketua fatayat situbondo.

"Saya pikir penting bagi perempuan untuk ber komunikasi dalam politik karena memang penduduk indonesia itu lebih banyak perempuan. Itu yang harus kita lihat. Kemudian yang kedua kadang kala mengapa perempuan perlu terlibat dalam politik adalah karena tidak semua masalah-masalah perempuan dipahami oleh bapak-bapak. Jadi dengan adanya anggota dewan perempuan diharapkan bisa mengadvokasi, mem-back up keputusan-keputusan yang nantinya bisa ramah perempuan, bisa mengerti perempuan, karena memang perempuan berbeda dengan laki-laki. Jadi produk undang-undang dan perda diharapkan bisa memahami tentang keperempuanan. Paling tidak ada wakil perempuan di dewan,"

Dari pernyataan Zeiniye memunculkan kenyataan bahwa ada perempuan yang merasa hak-haknya belum terakomodasi bahkan belum banyak dipahami. Pentingnya perempuan dalam komunikasi nya di dunia pollitik lebih diharapkan untuk membangun produk undang-undang dan kebijakan politik yang ramah perempuan.

Komunikasi politik perempuan dalam Fatayat Situbondo bisa dikatakan cukup baik, hal ini bisa dilihat dari berbagai kegiatan politik yang mereka lakukan, diantaranya dengan menjadi anggota dan pengurus partai dan kelompok kepentingan, melakukan hubungan dengan pejabat pemerintah pembuat kebijakan, serta terlibat dalam kegiatan pemungutan suara atau pemilihan umum.

6. Bentuk-bentuk komunikasi Perempuan dalam Komunikasi Politik

Dalam penelitian ini, merujuk pada pendapat Laswell tentang unsur komunikasi dan Pawito tentang unsur komunikasi politik, akan dibahas bagaimana peran perempuan di Fatayat Situbondo dalam komunikasi nya untuk melakukan komunikasi politik. Untuk memudahkan pembahasan, maka kita akan melihat komunikasi perampuan dalam komunikasi politi ke dalam peran mereka sebagai komunikator politik, pesan politik, khalayak komunikasi politik, saluran komunikasi politik, efek komunikasi yang diharapkan oleh perempuan serta konteks komunikasi politik perempuan di Fatayat Situbondo.

a. Perempuan Sebagai Komunikator Politik

Terlepas dari berbagai bentuk komunikasi dalam komunikasi politik yang bisa dilakukan oleh perempuan, sama halnya dengan laki-laki, perempuan juga dapat berperan sebagai komuikator politik. Dari hasil observasi dan penelitian, perempuan di Fatayat Situbondo melakukan perannya sebagai komunikator politik dengan menghubungi pejabat pembuat kebijakan baik secara langsung maupun melalui media lain seperti rapat partai atau mengikuti konsolidasi dengan organisasi kepentingan lain yang sesuai dengan kepentingan mereka.

"Itu yang baru kita bangun. Jadi seperti saya sampaikan pada perempuan Fatayat, seringkali masyarakat itu belum memberikan pendapat/ belum berani menyampaikan pendapat. Sebenarnya kita menampung sekali kalau ada aspirasi dari masyarakat, tapi seringkali, terutama perempuan tidak mau usul meskipun ditawari. Itu yang baru kita bangun, bahwa silahkan ibu-ibu punya pendapat, usulan atau mungkin permasalahan yang bisa disampaikan. Maka kita sampaikan ke atas, mungkin ke pihak yang berkaitan. Sebenarnya itu sudah kita buka, Cuma seringkali mereka sendiri yang belum menyampaikan," jelas Zeiniye[4].

Komunikator politik juga melakukan peran untuk melakukan

[4] Zeiniye. Wawancara tanggal 03 September 2016.

sosialisasi politik. Sosialisasi politik yang dilakukan oleh para perempuan di Fatayat DPD Peran perempuan sebagai komunikator politik untuk melakukan sosialisasi politik juga cukup berpengaruh dalam pendulangan suara, namun belum banyak perempuan yang bisa menduduki jabatan tertinggi, bahkan dalam partai politik.

Women play important roles in campaigning and mobilizing support for their parties, yet they rarely occupy decision-making positions in these structures. In fact, less than 11 per cent of party leaders world-wide are women. (perempuan memainkan peran penting dalam kampanye dan mobilisasi dukungan untuk partainya, namun dalam struktur partai mereka belum berada dalam posisi pembuat kebijakan. Faktanya, kurang dari 11% pemimpin partai didunia adalah perempuan.

Perempuan di Fatayat Situbondo melakukan perannya sebagai komunikator politik dengan menjadi penghubung antara masyarakat dengan partai dan pemerintah. Kegiatan perempuan di kepengurusan Fatayat Situbondo sebagai komunikator politik diantaranya dilakukan dengan menghubungi pejabat pembuat kebijakan, serta melakukan komunikasi politik melalui media lain seperti rapat partai atau mengikuti konsolidasi dengan organisasi kepentingan lain yang sesuai dengan kepentingan mereka.

b. Khalayak Komunikasi Politik Perempuan

Masyarakat bersifat multidimensional, beragam dan berbeda satu sama lain. Masyarakat tersusun dari beragam lapisan yang memiliki karakteristik masing-masing. Komunkator harus bisa melakukan identifikasi terhadap khalayak komunikasinya sehingga komunikasi yang dilakukan bisa efektif, pesan yang disampaikan lebih tepat dan khalayak yang dituju juga sesuai. Pada dasarnya melakukan identifikasi khalayak atau umumnya kita mengenal segmentasi khalayak, dilakukan untuk memudahkan komunikator dalam menganalisa perilaku dan pendekatan yang harus digunakan sehingga pada akhirnya akan bermuara pada tersampaikannya pesan kepada khalayak, dengan kata lain, komunikasi efektif.

Segmentasi memudahkan partai politik atau organisasi untuk menyusun program kerjanya, khususnya bagaimana cara berkomunikasi dan membangun interaksi dengan masyarakat. Partai politik melakukan segmentasi untuk memudahkan dalam menyusun pesan politik, pogram kerja, kampanye politik, sosialisasi dan produk politik.

Perempuan Fatayat Situbondo melakukan komunikasi politik dengan beberapa pihak, baik individual maupun organisasi. Khalayak

komunikasi poltik perempuan di Fatayat diantaranya adalah perempuan anggota Fatayat di wilayah Situbondo itu sendiri, pejabat pemerintah dan anggota dewan. Selain itu perempuan Fatayat Situbondo juga melakukan komunikasi politik dengan lembaga dan organisasi kepentingan yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan baik yang berada dalam lingkungan partai, pemerintahan serta umum. Khalayak komunikasi politik perempuan, dalam hal ini adalah komunikasi politik yang dilakukan oleh para pengurus Fatayat Situbondo secara khusus adalah perempuan anggota Fatayat Situbondo karena organisasi Fatayat sendiri memang diperuntukkan bagi perempuan. Namun tidak menutup kemungkinan target *audience* atau khalayak komunkasi politik dari perempuan ini adalah masyarakat luas pada umumnya.

Komunikasi politik yang coba dibangun oleh pengurus Fatayat Situbondo dengan lembaga dan organisasi dan lembaga yang peduli tentang masalah perempuan dilakukan untuk saling membagi informasi. Selain itu pengurus Fatayat juga melakukan studi pembelajaran tentang pengalaman lembaga perempuan yang dianggap lebih dulu ada dari pada Fatayat itu sendiri, sehingga dianggap lebih mengetahui tentang seluk-beluk pemberdayaan perempuan. Walaupun komuniasi yang dibangun kurang berhasil, namun para pengurus tetap mengusahakan terbangunya komunikasi antar lembaga pemberdayaan perempuan agar kegiatan pemberdayaan perempuan dapat efektif di setiap lapisan masyarakat

D. Simpulan

Dari seluruh uraian pembahasan deskripsi dan analisis penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan mengenai komunikasi perempuan dalam komunikasi politik di Fatayat NU Situbondo pada tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa: 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi komunikasi politik perempuan dalam komunikasi politik di Fatayat Situbondo terdiri dari alasan internal dan eksternal. Mereka ingin memberdayakan perempuan-perempuan Indonesia di semua sektor kehidupan, termasuk didalamnya politik. Berdakwah memperbaiki kehidupan negara, memperoleh kekuasaan, adanya dukungan partai dan keluarga, keinginan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan serta membangun citra positif partai melalui sosialisasi politik; dan 2) Faktor-faktor yang menjadi kendala strategi komunikasi politik perempuan dalam komunikasi politik di Fatayat Situbondo dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal perempuan. Beban ganda yang disandang perempuan, minimnya Sumber Daya Manusia karena tingkat pendidikan dan ekonomi. Adanya kesalahan terhadap pemahaman politik, kondisi geografis,

minimnya kesempatan berpolitik perempuan, sulitnya membangun koordinasi dengan organisasi pemberdayaan perempuan lain, *money politics, gender,*serta kurangnya dukungan partai membuat perempuan kurang percaya diri untuk berstrategi komunikasi politik secara aktif dalam politik.

Sedangkan bentuk komunikasi politik perempuan di Fatayat Situbondo adalah: 1) Perempuan sebagai komunikator politik, membangun komunikasi dengan khalayak baik anggota Fatayat, pejabat pembuat kebijakan, dan organisasi pemberdayaan perempuan; 2) Perempuan menciptakan pesan dan perempuan menjadi pesan itu sendiri. Pesan yang disampaikan perempuan lebih disesuaikan dengan tujuan atau efek komunikasi politik yang mereka inginkan seperti untuk sosialisasi partai politik, pemberdayaan perempuan, dan mempengaruhi kebijakan; 3) Perempuan melalui organisasi Fatayat Situbondo juga dapat bertindak sebagai saluran komunikasi politik disamping menggunakan media komunikasi personal dan media massa; dan 4) Perempuan juga tidak segan menggunakan media komunikasi politik seperti demonstrasi untuk meraih tujuan politik mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya.* Jakarta: Kencana. 2007.

----------. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat.* Jakarta: Kencana. 2007.

Cangara, Hafid. Komunikasi politik, konsep teori danstrategi. Jakarta rajawali press. 2009.

Dahlan, Alawi. Perkembangan Komunikasi Politik Sebagai Bidang Kajian, Makalah Disampaikan Pada Diskusi Panel Korps Mahasiswa Ilmu Social Univesita Gadjah Mada Yogjakarta, 30 maret 1990

Dan Nimmo, political communication and public opinion, good year publishing company: California. 2005,

Effendi, Onong U. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek.* Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007.

Gaffar, Affan. *politik indonesia transisi menuju demokrasi*; Jogjakarta; pustaka pelajar. 2004.

Holik, Idham. *Strategi komunikasi partai politik peserta pemilu 2004: Evaluasi strategi komunikasi politik PKB kabupaten Bekasi tentang isu keterwakilan perempuan di lembaga legislative*. 2005.

Littlejohn, Stephen W. *Theories of Human Communication. Canada:*

Wadsworth. 2004.

Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya.* Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006.

Nimmo, *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan Dan Media Terjemahan Tjun Sujarman* , Bandung : Remaja Rosdakarya. 1993.

Pawito, *Komunikasi Politik: Media Massa Dan Kampanye Pemilihan*, Jogjakarta; Jalasutra.

Rahmiatie, Atie, Yusuf Hamdan dan Zaenal Mukarom, *dinamika Komunikasi Politik atas partisipasi dan keterwakilan perempuan di parlemen,* 2010.

Sukidin, Basrowi. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya: Insan Cendikia. 2002.

Yanti Hermawati, *Pengelolaan Kesan Dalam Komunikasi Politik: Upaya Meningkatkan Peran Perempuan Di Dpr Ri Dalam Pencapaian Mdgs 2014*.

Zulkarnain, Nasution. *Komunikasi Politik Suatu Pengantar, Galia Indonesia*. 1990.